

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) PENERAPAN SPIP
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2023	2023
A	RTP ATAS PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN								
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	1) Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat, 2) Menyusun Kode Etik SKPD, 3) Sosialisasi Kode Etik SKPD	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat	Sosialisasi melalui rapat dan surat edaran	Sekretaris Badan		Juni	Desember
2	Komitmen terhadap Kompetensi	1) Sosialisasi tentang strategi dan perencanaan peningkatan kompetensi bagi pegawai, 2) Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi pegawai yang menjalankan tugas khusus	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Road Map Pengembangan Kompetensi Bagi ASN	Sosialisasi melalui rapat dan surat edaran	Kepala Badan		Juli	Desember
3	Kepemimpinan yang Kondusif	1) Sosialisasi tentang Pengendalian Intern kepada seluruh pegawai	Kasubag Perencanaan	Tujuan dari SPIP	Sosialisasi melalui rapat dan surat edaran	Sekretaris Badan		September	September
4	Struktur Organisasi	1) Melatih pejabat yang ditunjuk dalam struktur pengendalian internal	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Informasi mengenai pelaksanaan pelatihan	Surat	Sekretaris Badan		April	Desember
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	1) Melakukan evaluasi bulanan terhadap kinerja Sekretariat/Bidang, Subbag/Subbid, dan JFU secara berjenjang	Seluruh Pejabat Struktural	Kinerja setiap ASN	Rapat rutin	Kepala Badan		Januari	Desember
6	Kebijakan Pengembangan SDM	1) Membuat surat usulan perihal penambahan anggaran untuk pengembangan SDM	Kasubag Perencanaan	Pentingnya pengembangan SDM serta dukungan untuk penambahan anggaran	Surat usulan	Sekretaris Badan		Juli	Desember
7	Pengawasan Internal	1) Melaksanakan bimbingan teknis pada pegawai sub bagian keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Informasi mengenai pelaksanaan bimtek	Surat	Sekretaris Badan		Januari	Desember

8	Hubungan Kerja yang Baik	1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional, 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi/organisasi yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, dan BPK)	Sekretaris Badan dan seluruh Kepala Bidang	Sharing informasi dengan instansi terkait	Koordinasi	Kepala Badan		Januari	Desember
B RTP ATAS PENCAPAIAN RESIKO									
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Menambahkan syarat peserta di pemanggilan peserta diklat	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah peserta diklat	Surat permintaan peserta, Email , WhatsApp, Telpon	Sekretaris		Februari	Juli
2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Memberi saran dan masukan kepada OPD	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Laporan evaluasi peserta dari OPD asal	Surat permintaan, email , WhatsApp, Telpon	Sekretaris		Maret	Agustus
3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Koordinasi intens dengan instansi terkait dan OPD lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah peserta uji kompetensi	Surat permintaan peserta, Email , WhatsApp, Telpon	Sekretaris		Februari	September
4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	pada saat perubahan anggaran, akan dihitung ulang berapa peserta pengembangan kompetensi	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah undangan pengembangan kompetensi ASN	Surat undangan dan surat pengiriman peserta	Sekretaris		Maret	November
5	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Melakukan pergeseran anggaran untuk penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi Manajerial	Jumlah peserta diklat	Surat permintaan, email , WhatsApp, Telpon	Sekretaris		Februari	Desember

6	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembang	Penyesuaian anggaran kembali pada saat tahapan perubahan anggaran dilaksanakan	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan	Data hasil evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi	Surat edaran dan koordinasi langsung	Sekretaris		Maret	November

Padang, Maret 2023
KEPALA BPSDM PROVINSI SUMATERA BARAT

Dr. Ir. DESNIARTI, MM
NIP. 19650824 199003 2 001

	Meningkatkan kompetensi manajerial dan fungsional ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Mundurinya jadwal pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi Manajerial	Risiko Kinerja	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin dll)	Adanya kegiatan Latsitardanus, dimana sarana dan prasarana digunakan untuk kegiatan tersebut	Internal	C	1.20	Pencapaian target kinerja mundur dari rencana awal	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi Manajerial	Accept	Melakukan pergeseran anggaran untuk penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan
6	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembang Tersedianya dokumen hasil pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan kelembagaan	Kemungkinan terjadinya silpa anggaran	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan	Risiko Kinerja	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin dll)	Distribusi instrumen evaluasi tidak berjalan maksimal	Internal	C	1.00	Tidak maksimalnya hasil laporan pembinaan dan evaluasi	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan	Accept	Penyesuaian anggaran kembali pada saat tahapan perubahan anggaran dilaksanakan

Disusun oleh : Kasubag Perencanaan Yasri Ardi, ST
Direview oleh : Sekretaris Widya Sari, SE.Ak, MM

Padang, Maret 2023
KEPALA BPSDM PROVINSI SUMATERA BARAT

Dr. Ir. DESNIARTI, MM
NIP. 19650824 199003 2 001

Petunjuk Pengisian:

- kolom (1)
- kolom (2)
- kolom (3)
- kolom (4a)
- kolom (4b)

Cukup jelas
Diisi dengan kegiatan dan tujuan kegiatan
Uraikan peristiwa yang merupakan risiko
Sebutkan pihak yang bertanggung jawab mengelola risiko
Diisi dengan klasifikasi risiko:
Risiko Kepatuhan
Risiko Finansial
Risiko Hukum
Risiko Reputasi
Risiko Lainnya

kolom (4c)

Diisi dengan keterkaitan risiko dengan 4 (empat) tujuan SPIP:

No	Tujuan SPIP
1	Keandalan pelaporan keuangan
2	Pengamanan aset negara
3	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin dll)
4	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

kolom (5)
kolom (6)
kolom (7)
kolom (8)

Uraikan penyebab timbulnya risiko
Sebutkan pihak/ unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko (eksternal atau internal)
diisi dengan *controllable(C)* atau *uncontrollable(UC)* dari penyebab risiko bagi unit tersebut
Diisi dengan frekuensi keterjadian, dengan contoh sebagai berikut

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50 Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50% Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

kolom (9)

Uraikan dampak yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, dengan contoh sebagai berikut:

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak
1	Rendah Sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan Menimbulkan kerusakan kecil Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.100.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal) Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
2	Rendah	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan
3	Tinggi	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,- Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
4	Tinggi Sekali	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu Kerusakan Fatal Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,- Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak Terjadinya KKN dan diproses secara hukum

kolom (10)
kolom (11)

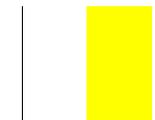
Sebutkan pihak/ unit yang menderita jika risiko benar-benar terjadi

Diisi dengan pilihan respon risiko

<i>Avoid</i>	Menghindari risiko
<i>Transfer</i>	Transfer risiko
<i>Mitigate</i>	Pencegahan risiko
<i>Accept</i>	Menerima risiko

kolom (12)

Diisi Pengendalian yang harus ada atas Risiko



Identifikasi Tujuan

Visi 1: Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

No	Misi	Tujuan Strategis	Sasaran Program/Kegiatan	Proses Kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya Kompetensi ASN	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi profesi aparatur	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
2				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
3				Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4				Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
5				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
6				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembang

Catatan:

Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dokumen renstra
5. Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis

1

Visi Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

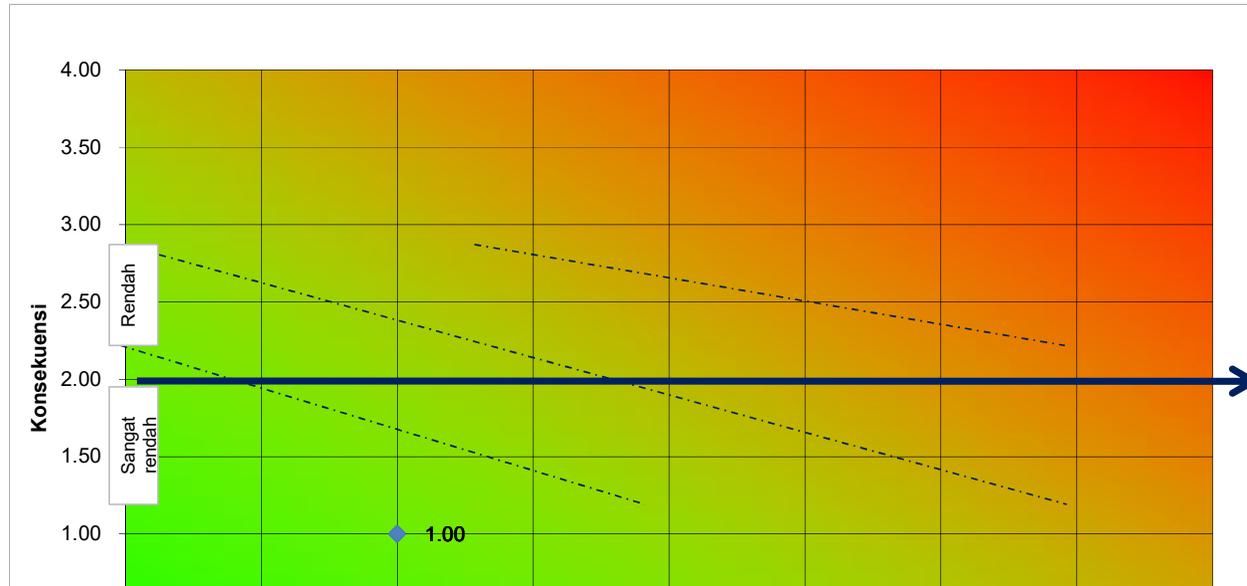
No	Bidang/Program/Kegiatan	Tujuan /Sasaran			Penjelasan
		Aktual	Formal	Terkonfirmasi	
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan kompetensi teknis ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Meningkatkan kompetensi teknis ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat		
2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersedianya dokumen hasil pembinaan dan evaluasi pengembangan kompetensi teknis	Tersedianya dokumen hasil pembinaan dan evaluasi pengembangan kompetensi teknis		
3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sertifikasi ASN lingkup Pemprov. Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sertifikasi ASN lingkup Pemprov. Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota		
4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Tersedianya laporan pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi dan sumber belajar	Tersedianya laporan pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi dan sumber belajar		
5	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Meningkatkan kompetensi manajerial dan fungsional ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Meningkatkan kompetensi manajerial dan fungsional ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat		
6	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama serta Pengembang	Tersedianya dokumen hasil pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan kelembagaan	Tersedianya dokumen hasil pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan kelembagaan		

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO							
No	Program/Kegiatan yang Mendukung Renstra/Renja	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan (Output/Outcome)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko (Sumber Risiko)	C/UC	Pemilik Risiko	Dampak pada Pencapaian Tujuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan kompetensi teknis ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Terjadinya pengunduran diri peserta	Kurangnya seleksi dari OPD	C	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Kuota peserta tidak terpenuhi sesuai jadwal pelaksanaan
2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersedianya dokumen hasil pembinaan dan evaluasi pengembangan kompetensi teknis	Kurangnya respon dari aparat yang dibina	Aparat yang dibina tidak sesuai bidangnya	C	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Tidak maksimalnya hasil pembinaan dan evaluasi
3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sertifikasi ASN lingkup Pemprov. Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota	Adanya kemungkinan silpa pada anggaran kegiatan	Kuota peserta tidak terpenuhi sesuai target awal	C	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan	Tidak tercapainya target pelaksanaan kegiatan
4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Tersedianya laporan pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi dan sumber belajar	Rendahnya realisasi anggaran kegiatan	Pengiriman peserta pengembangan kompetensi sesuai undangan, sehingga sifatnya menunggu, sementara realisasi anggaran tidak bisa dipastikan setiap bulannya.	C	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan	Rendahnya capaian kinerja kegiatan
5	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Meningkatkan kompetensi manajerial dan fungsional ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Mundurinya jadwal pelaksanaan kegiatan	Adanya kegiatan Latsitardanus, dimana sarana dan prasarana digunakan untuk kegiatan tersebut	C	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi Manajerial	Pencapaian target kinerja mundur dari rencana awal

6	Pembinaan, Pengeordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembang	Tersedianya dokumen hasil pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan kelembagaan	Kemungkinan terjadinya silpa anggaran	Distribusi instrumen evaluasi tidak berjalan maksimal	C	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan	Tidak maksimalnya hasil laporan pembinaan dan evaluasi
	PETUNJUK PENGISIAN						
	- Kolom 1	ah jelas					
	- Kolom 2	atan yang Mendukung Renstra/Renja					
	- Kolom 3	/Renja (tujuan operasional sebagai tujuan antara atas tujuan entitas)					
	- Kolom 4	ataan risiko yang diidentifikasi					
	- Kolom 5	risiko, baik yang bersumber internal maupun eksternal					
	- Kolom 6	alikan risiko yang terjadi (controllable/uncontrollable)					
	- Kolom 7	angani risiko untuk mengamankan pencapaian tujuan					
	- Kolom 8	iko tersebut terjadi (1 sangat rendah; 2 rendah; tinggi; sangat tinggi)					
	- Kolom 9	ersebut (1 sangat jarang; 2 jarang; 3 sering; 4 sangat sering)					
	- Kolom 10	yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi					
	- Kolom 11	: probabilitas terjadinya risiko tersebut					
	- Kolom 12	berpengaruh terhadap pencapaian tujuan					
	- Kolom 13	evel hasil pemetaan risiko					
	- Kolom 14	s penanganan/pengendalian risiko					
	- Kolom 15	nganan risiko yang akan dilakukan					

Probabilitas Terjadinya Risiko	Skor Dampak	Skor Probabilitas	Total Risiko	Peta Risiko	Prioritas Risiko		
9	10	11	12	13	14		
	1.00	1.00	1.00				3
	1.00	1.00	1.00				
	1.00	1.00	1.00				
	1.10	1.15	1.27				
	1.15	1.20	1.38				

PETA RISIKO



No. Risiko	Kegiatan
5	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan
2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan
6	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan

Pernyataan Risiko	Rata2 Kemungkinan	Rata2 Dampak	Total Risiko	Peta Risiko
Mundurinya jadwal pelaksanaan kegiatan	1.20	1.15	1.38	
Rendahnya realisasi anggaran kegiatan	1.15	1.10	1.27	
Adanya kemungkinan silpa pada anggaran kegiatan	1.00	1.00	1.00	
Terjadinya pengunduran diri peserta	1.00	1.00	1.00	
Kurangnya respon dari aparat yang dibina	1.00	1.00	1.00	
Kemungkinan terjadinya silpa anggaran	1.00	1.00	1.00	

- Kolom 3	Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko, baik yang bersumber internal maupun eksternal								
- Kolom 4	Diisi dengan uraian tingkat dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi (1 sangat rendah; 2 rendah; tinggi; sangat tinggi)								
- Kolom 5	Diisi dengan uraian identifikasi infrastruktur yang sebaiknya ada untuk mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian diidentifikasi berdasarkan sub unsur aktivitas pengendalian yang relevan								
- Kolom 6	Diisi dengan uraian identifikasi infrastruktur yang telah ada								
- Kolom 7	Diisi dengan uraian substansi identifikasi infrastruktur yang telah ada (telah memadai, cukup memadai, kurang memadai)								
- Kolom 8	Diisi dengan jenis pengendalian atas identifikasi infrastruktur yang telah ada								
- Kolom 9	Diisi dengan uraian penyebab belum memadainya infrastruktur yang telah ada								
- Kolom 10	Diisi dengan uraian langkah penguatan/perbaikan infrastruktur yang telah ada								
- Kolom 11	Diisi dengan uraian infrastruktur pengendalian yang masih perlu dibangun								
- Kolom 12	Diisi dengan uraian substansi infrastruktur pengendalian yang masih perlu dibangun								
- Kolom 13	Sudah jelas								

DESAIN MONITORING RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

LEVEL MANAJEMEN ENTITAS

Nama Instansi Pemerintah (K/L/P) : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat
 Nama Eselon I : -
 Nama Eselon II (Satker/SKPD) : Dr. H. Jefrinal Arifin, SH, M.Si

RENCANA STRATEGIS

Visi (Vision) :
 Misi (Mision) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta berkualitas
 Tujuan Jangka Panjang (Goals) :
 Tujuan Jangka Pendek : Administrasi keuangan dan pengelolaan aset, dengan sasaran peningkatan opini atas laporan keuangan (wajar tanpa pengecualian)

No	Kelemahan Lingkungan Pengendalian dan Risiko Pencapaian Tujuan	Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian	Infrastruktur Kegiatan Pengendalian yang Masih Perlu Dibangun	Metode Monitoring yang Dilaksanakan *)		Penanggung Jawab Monitoring	Waktu dan Frekuensi Monitoring	Keterangan
				Monitoring Berkelanjutan	Evaluasi Terpisah oleh Auditor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Kelemahan Lingkungan Pengendalian							
1								
2								
3								
4								
B.	Risiko Pencapaian Tujuan							
1								
2								
3								
4								

*) Monitoring berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas SPI, yang dapat dilaksanakan baik oleh APIP atau pihak eksternal.

Bandung, 2013
 a.n. Walikota
 Sekretaris Daerah

.....
 NIP.

Sumber Informasi	Metode Monitoring yang Dilaksanakan *) Waktu dan Frekuensi Monitoring		Keterangan
	Monitoring Berkelanjutan (oleh atasan)	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	
6			8
OPD se-Sumbar	Sekretaris		
OPD se-Sumbar	Sekretaris		
OPD se-Sumbar	Sekretaris		
Instansi pelaksana pengembangan kompetensi	Sekretaris		
OPD se-Sumbar dan BKPSDM Kab/Kota	Sekretaris		
Seluruh bidang pelaksana pelatihan	Sekretaris		

MATRIK KRITERIA KEMUNGKINAN (LIKELIHOOD)

KRITERIA	PROBABILITAS	
	RATING	%
hampir pasti terjadi	5	> 91
sering terjadi	4	51-90
kemungkinan terjadi	3	31-50
kecil kemungkinan, tapi tidak mustahil	2	11-30
sangat tidak mungkin, hampir mustahil	1	0-10

MATRIK LEVEL RISIKO

KRITERIA	PETA RISIKO	
	RATING	%
ekstrim	5	> 15
tinggi	4	> 10-15
moderat	3	> 4-10
rendah	2	> 2-4
sangat rendah	1	0-2



MATRIK KRITERIA KEMUNGKINAN (LIKELIHOOD)

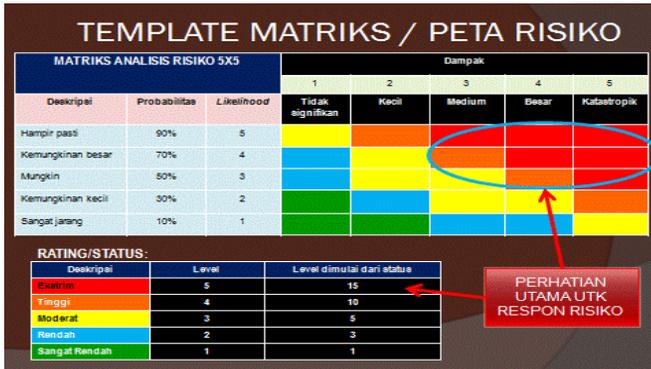
KRITERIA	PROBABILITAS	
	RATING	%
sangat sering, hampir pasti terjadi	4	> 75
sering terjadi	3	51-75
kemungkinan terjadi, meskipun kecil	2	21-50
sangat jarang terjadi	1	0-20

MATRIK LEVEL RISIKO

KRITERIA	PETA RISIKO	
	RATING	%
sangat tinggi	4	> 8
tinggi	3	> 4 - 8
kecil	2	> 2 - 4
sangat kecil	1	0 - 2

MATRIK KRITERIA DAMPAK (CONSEQUENCE)

KRITERIA	RATING	DAMPAK		DAMPAK
sangat tinggi	5	KEUANGAN	OPERASIONAL	REPUTASI
besar	4	kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media
menengah	3	kerugian besar	kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal
kecil	2	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal
sangat kecil, tidak signifikan	1	kerugian kecil, kurang material	kegiatan terhambat, kurang efisien	negatif, terdapat pemberitaan
		kerugian tidak material	hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	ada pemberitaan negatif, namun tidak material
				HUKUM pelanggaran serius, terkena sanksi



KRITERIA RISK ACCEPTANCE

Level Risiko	Kriteria untuk Pengelolaan Risiko		Yang Bertanggung Jawab
1 – 3	Dapat diterima	Dengan pengendalian yang cukup	Pimpinan Menengah/Operasional
4 – 6	Dipantau	Dengan pengendalian yang cukup	Pimpinan Menengah/Operasional
6 – 9	Diperlukan Pengendalian Manajemen	Dengan pengendalian yang cukup	Pimpinan Menengah/Operasional
10 – 14	Harus menjadi perhatian manajemen (urgen)	Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (excellent)	Pimpinan Puncak
15 – 25	Tak dapat diterima (unacceptable)	Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (excellent)	Pimpinan Puncak

MATRIK KRITERIA DAMPAK (CONSEQUENCE)

KRITERIA	DAMPAK			DAMPAK	
	RATING	KEUANGAN	OPERASIONAL	REPUTASI	HUKUM
sangat tinggi	4	kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
tinggi	3	kerugian besar	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
kecil	2	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efisien	negatif, terdapat pemberitaan	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
sangat kecil	1	kerugian kecil, kurang material	ada hambatan kegiatan, namun tertangani	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	pelanggaran biasa, sanksi teguran

